



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARIA GORETTI INDRAWATI GUNAWAN
2. Jabatan : VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN DAN KOMERSIALISASI PRODUK NIAGA
3. NHK : 279437

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 952.402.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/65 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 423.410.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m²/73 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 523.992.000
3. Tanah Seluas 496 m² di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 506.143.500

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.5 G M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA VENTURER 2.0 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 412.643.500

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.700.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 119.827.500**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 150.909.583**F. HARTA LAINNYA** Rp. 9.815.098

Sub Total Rp. 1.859.797.681

III. HUTANG Rp. 565.174.751**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.294.622.930

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.